



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 1900 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2017**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan mengukur serta meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 perlu menetapkan Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perjanjian Kinerja Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PERJANJIAN KINERJA PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2017.

- KESATU : Menetapkan Kinerja Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Oktober 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Tembusan :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
2. Menteri Dalam Negeri
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

Lampiran I : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 1900 TAHUN 2017  
Tanggal 13 Oktober 2017

PERJANJIAN KINERJA

UNIT SATUAN KERJA : PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA  
TAHUN ANGGARAN : 2017

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	1 Mendorong Peningkatan Predikat LAKIP	BB
		2 Mendorong Peningkatan Opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP
2	Meningkatnya akses dan kualitas kesehatan masyarakat	1 Angka kematian ibu	30 orang per 100.000 kelahiran hidup
		2 Angka kematian bayi	7,10 bayi per 100.000 kelahiran hidup
		3 Angka Usia Harapan Hidup	76,80 tahun
3	Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan bagi semua masyarakat	Angka rata-rata lama sekolah	11,87
4	Meningkatnya pelayanan kebutuhan dasar kepada korban bencana	Response time pelayanan kebutuhan dasar bagi korban bencana	3 jam
5	Peningkatan kinerja pengelolaan persampahan	1 Persentase sampah dalam kota yang dapat ditangani secara tepat waktu	100%
		2 Persentase pengurangan timbunan sampah di sumber	15%
6	Meningkatnya pelayanan penempatan tenaga kerja	Persentase pencari kerja yang ditempatkan	85% dari seluruh pencari kerja yang terdaftar dapat ditempatkan

NO	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
7	Meningkatnya Kurikulum Pelatihan Keterampilan Pusat Pelatihan Kerja (PPK) sesuai dengan Kebutuhan Pasar Kerja	1	Persentase jumlah lulusan Pusat Pelatihan Kerja (PPK) yang ditempatkan	80% dari jumlah lulusan Pusat Pelatihan Kerja (PPK) yang ditempatkan
8	Tersedianya sistem tata air yang optimal dalam mendukung upaya pengendalian banjir, banjir rob dan dampak perubahan iklim lainnya	1	Terlaksananya pengerukan sungai	30.486 m
		2	Panjang pengaman pantai yang terbangun	1.099 m
9	Tersedianya jaringan jalan dan trotoar dengan kualitas yang mantap untuk melayani sirkulasi dari/ke dalam kota	1	Persentase kondisi jalan dalam kondisi baik pada Jaringan Jalan Arteri/Kolektor Sekunder	98.00%
		2	Panjang trotoar yang terbangun pada jaringan jalan arteri/kolektor sekunder	12.180 m
10	Tersedianya sistem transportasi perkotaan yang terpadu dan memadai untuk melayani pergerakan orang dan barang	1	Jumlah penumpang Bus Transportasi Jakarta per hari	506.000 pnp/hari
11	Meningkatnya Ruang Bagi Sektor Informal pada Kawasan Perkantoran, Perdagangan dan Permukiman	1	Persentase peningkatan luas ruang PKL (m <sup>2</sup> ) di lokasi binaan dan lokasi sementara	20%
12	Meningkatnya peran serta masyarakat dan pemangku kepentingan dalam proses pembangunan	1	Jumlah aspirasi warga Jakarta yang direspon dari berbagai saluran media	75%
13	Berkurangnya tingkat risiko/efek negatif akibat kebakaran	1	Tingkat waktu tanggap kebakaran (response time) 15 menit	82%
14	Meningkatnya pelayanan pajak dan pelayanan perizinan yang transparan dan akuntabel dengan memanfaatkan teknologi informasi	1	jumlah wajib pajak yang transaksinya dapat dimonitor secara online	10.237 wajib pajak
15	Meningkatnya Intensitas dan Inovasi Promosi Pariwisata	1	Jumlah kunjungan wisata mancanegara	2.485.864 orang
		2	Jumlah kunjungan wisata nusantara	31.435.592 orang

NO	SASARAN		INDIKATOR KINERJA	TARGET
16	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada semua lapisan masyarakat	1	Persentase penyelesaian perizinan dan non perizinan yang tepat waktu	99%
17	Meningkatnya kuantitas dan kualitas SDM aparatur yang sesuai dengan kebutuhan organisasi	1	Jumlah SDM Aparatur hasil rekrutmen berbasis CAT (Computer Assisted Test)	2.000 CPNS
18	Meningkatkan Investasi Daerah yang berkualitas dan selektif untuk mendukung Perekonomian Daerah yang lebih efisien, efektif dan inklusif dengan tetap menggunakan prinsip Good Governance	1	Jumlah Realisasi PMA dan PMDN	55 triliun
19	Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menjaga ketentraman dan ketertiban kota	1	Skala Indeks Demokrasi	85 poin

Jumlah APBD Tahun Anggaran 2017

: Rp. 70.191.958.203.554

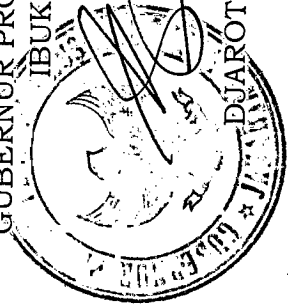
Jumlah Anggaran Belanja Tahun Anggaran 2017

: Rp. 63.612.303.305.596

Jumlah Anggaran Belanja Langsung Tahun Anggaran 2017

: Rp. 35.556.556.457.667

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Lampiran II : Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta

Nomor 1900 TAHUN 2017  
Tanggal 13 Oktober 2017

INDIKATOR EKONOMI MAKRO DAN SOSIAL  
PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA

NO	INDIKATOR EKONOMI MAKRO DAN SOSIAL	PROYEKSI 2017
1	Pertumbuhan Ekonomi	6.03% - 6.43%
2	Tingkat Inflasi	4% - 5%
3	PDRB Harga Berlaku	2.452,86 miliar rupiah
4	PDRB Harga Konstan Tahun 2010	1.635,24 miliar rupiah
5	Struktur Ekonomi Menurut Lapangan Usaha	
	A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	0,09%
	B. Pertambangan dan Penggalan	0,18%
	C. Industri Pengolahan	12,49%
	D. Perdagangan Listrik dan Gas	0,24%
	E. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,04%
	F. Konstruksi	12,58%

NO	INDIKATOR EKONOMI MAKRO DAN SOSIAL	PROYEKSI 2017
	G. Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	15,78%
	H. Transportasi dan Pergudangan	3,45%
	I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	4,98%
	J. Informasi dan Komunikasi	10,61%
	K. Jasa Keuangan dan Asuransi	11,09%
	L. Real Estate	6,56%
	M, N. Jasa Perusahaan	7,61%
	O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,95%
	P. Jasa Pendidikan	4,95%
	Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,67%
	R. Jasa Lainnya	3,73%
6	Struktur Ekonomi Menurut Pengeluaran	
	1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	58,11%
	2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	1,86%
	3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	11,45%
	4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	43,25%
	5. Perubahan Inventori	0,84%



NO	INDIKATOR EKONOMI MAKRO DAN SOSIAL	PROYEKSI 2017
6.	Ekspor Barang dan Jasa	13,70%
7.	Dikurangi Impor Barang dan Jasa	44,31%
8.	Net Ekspor Antar Daerah	15,10%
7	PDRB per Kapita	236,44 juta rupiah
8	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	14,36%
9	Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap PDRB	16,91%
10	Rasio Dana Perimbangan terhadap PDRB	7,65%
11	APBD	Rp. 70.191.958.203.554
12	ICOR	8,87
13	Kemampuan Investasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta	13,97 triliun
14	Peranan Investasi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Terhadap Investasi Total	1,45%
15	Ekspor	
	a. Melalui Pelabuhan Muat DKI Jakarta	46.390.850.590 USD
	b. Produk asal DKI Jakarta	11.538.106.633 USD
16	Impor melalui Pelabuhan Muat DKI Jakarta	71.132.687.000 USD
17	Jumlah Wisman	3.200.000
18	Jumlah Penduduk	10.374.235

NO	INDIKATOR EKONOMI MAKRO DAN SOSIAL	PROYEKSI 2017
19	Kepadatan Penduduk	15.682,42
20	Angka Kelahiran Total (TFR)	2,1%
21	Jumlah Angkatan Kerja	5.461.870 orang
22	Jumlah Penduduk Bekerja	5.169.170 orang
23	Tingkat Pengangguran Terbuka	9,3%
24	Jumlah Penduduk Miskin	389,69 ribu orang
25	Persentase Jumlah Penduduk Miskin	3,77%
26	Indeks Pembangunan Manusia	79,60%
27	Persentase APK SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA/SMK	
	- SD/MI	113,40%
	- SMP/MTs	115,50%
	- SMA/MA/SMK	97,00%

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,



*[Signature]*

DJAROT SAIFUL HIDAYAT